

BAB I PENDAHULUAN

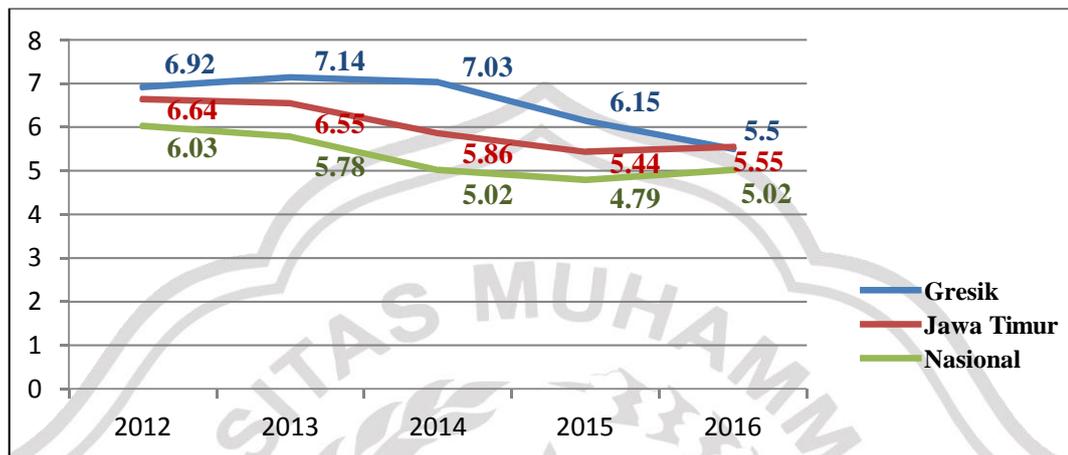
1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu daerah terutama di Indonesia. Hal ini dikarenakan usaha mikro, kecil dan menengah dapat meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. Selain itu, usaha mikro, kecil dan menengah juga mampu membantu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja. Dengan banyaknya jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia, maka semakin banyak penciptaan peluang lapangan kerja bagi para pengangguran.

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang banyak diminati masyarakat Indonesia, terutama setelah terjadinya krisis ekonomi yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja pada perusahaan-perusahaan besar. Setelah terjadinya krisis tahun 1997 di Indonesia, usaha mikro, kecil dan menengah dapat membuktikan bahwa sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan usaha mikro, kecil dan menengah mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar lainnya yang cenderung mengalami keterpurukan dengan dibuktikan semakin bertambahnya jumlah usaha mikro, kecil dan menengah setiap tahunnya di Indonesia.

Kabupaten Gresik adalah salah satu kabupaten yang menopang sektor perekonomian Jawa Timur. Kabupaten Gresik juga merupakan kota yang mengalami perkembangan cukup pesat pada sektor industri, mulai dari industri

berskala kecil hingga industri berskala besar. Hal ini juga didukung oleh beberapa industri yang tumbuh di setiap Kecamatan di Kabupaten Gresik. Beberapa Kecamatan yang berada di Kabupaten Gresik memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik.



Sumber data: Badan Pusat Statistik Kab. Gresik, data diolah 2020.

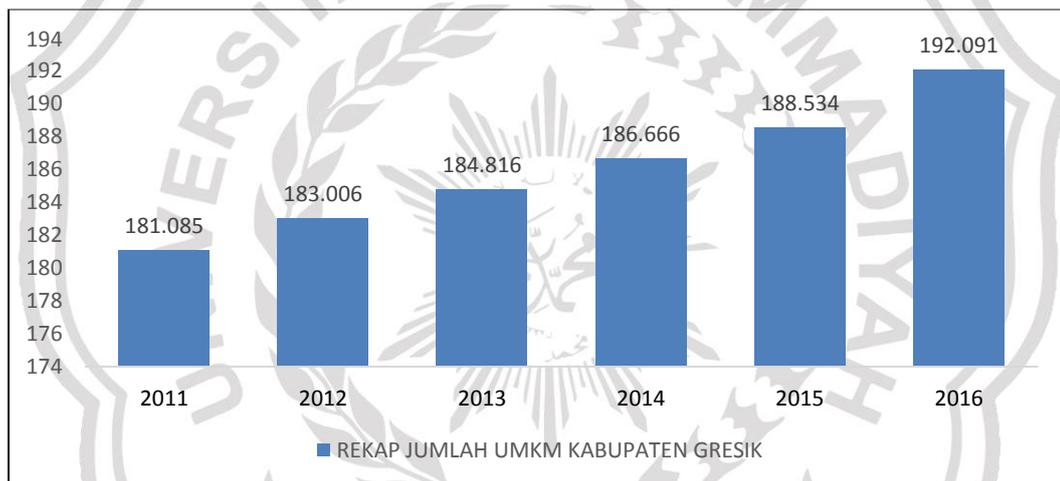
Gambar 1.1
Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Gresik, Jawa Timur, Nasional

Berdasarkan analisis grafik pada gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik rasio kenaikannya di atas rata-rata yaitu sebesar 5.50% pada tahun 2016. Ditinjau berdasarkan posisi relatif pertumbuhan ekonomi antara Gresik dengan Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Gresik di atas Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan sebesar 5.55% pada tahun 2016. Kondisi ini selaras jika ditinjau dari posisi relatif pertumbuhan ekonomi antara Gresik terhadap Nasional pada tahun 2016 yaitu tumbuh sebesar 5.02%. Atas dasar tersebut peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Gresik.

Kabupaten Gresik selain terkenal dengan kota industri juga menyimpan potensi usaha mikro, kecil dan menengah yang seharusnya menjadi perhatian lebih bagi pemerintah daerah. Keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah harus

bisa dipertahankan dan dikembangkan agar dapat terus berperan meningkatkan perekonomian daerah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah pengangguran, jumlah kemiskinan, dan pemerataan dalam pendapatan dan pembangunan ekonomi negara.

Dari pernyataan di atas, tidak bisa dipungkiri bahwa usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Gresik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan dan memperlancar perekonomian daerah.



Sumber data: DISKOPERINDAG Kab. Gresik, data diolah 2020.

Gambar 1.2
Rekap Jumlah UMKM Kabupaten Gresik Tahun 2011 – 2016

Salah satu kontribusi terbesar pertumbuhan dan perkembangan ekonomi berasal dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Gresik selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Menurut Hari Wahyudi S.E., MM. selaku kasi permodalan DISKOPERINDAG Kabupaten Gresik, Kabupaten Gresik sebagai kota perdagangan dan jasa tidak mengherankan apabila memiliki banyak produk dan jasa unggulan. Oleh karena itu, perlu upaya strategis agar pemilik usaha mikro, kecil dan menengah dapat mempertahankan usaha yang didirikannya dan mengendalikan keuangan yang dikelolanya dengan menerapkan sistem akuntansi keuangan yang berlaku dalam pencatatan keuangannya.

Kabupaten Gresik sebagai kota industri tidak hanya bergerak pada industri perdagangan saja, melainkan banyak juga yang bergerak di industri jasa. Gresik Kota Baru yang dikembangkan oleh PT. BLP Property (Bumi Lingga Pertiwi ini merupakan kawasan paling potensial di Kabupaten Gresik. Banyak masyarakat baik warga asli Gresik Kota Baru maupun bukan warga asli telah mengembangkan usahanya di wilayah Gresik Kota Baru, baik usaha dagang maupun usaha jasa.

Gresik Kota Baru juga terdapat banyak tempat pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Universitas dan Lembaga Bimbingan Belajar yang pastinya membutuhkan banyak berkas yang digandakan untuk dipelajari murid dan mahasiswanya. Selain itu, baik usaha dagang maupun instansi juga membutuhkan penggandaan dokumen untuk diarsipkan. Oleh karena itu, banyak juga usaha jasa *photocopy* yang bersaing dan berkembang di area Gresik Kota Baru untuk melayani kebutuhan masyarakat sekitar.

Usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru pada umumnya menyediakan jasa percetakan print dan *photocopy*. Berkaitan dengan pengendalian keuangan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), peneliti telah melakukan

penelitian pada 3 usaha jasa *photocopy* di area Gresik Kota Baru, yaitu Ireng Poteh, RJM Fotocopy Gresik, dan Gresik Setting.

Salah satu tolak ukur kesuksesan usaha mikro, kecil dan menengah, baik usaha dagang maupun usaha jasa terutama usaha jasa *photocopy* adalah kondisi keuangannya. Menganalisis laporan keuangan berarti menggali lebih banyak informasi yang tertulis dalam laporan keuangan yang dibuat oleh suatu usaha. Jika informasi ini disajikan dengan tepat, maka informasi tersebut sangat berguna bagi siapa saja untuk mengambil keputusan tentang usaha yang dilaporkan.

Laporan keuangan merupakan dasar untuk analisis atas suatu perusahaan (Santoso, dan Handayani, 2019: 24). Laporan keuangan biasanya diperoleh dari proses berjalannya sistem akuntansi yaitu melalui pencatatan keuangan (Harahap, 2013). Namun praktik akuntansi keuangan pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhairi, 2014).

Kurangnya kemampuan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang pengelolaan usaha dan kendala yang dihadapi usaha mikro, kecil dan menengah antara lain rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman pelaku atau pemilik usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang keuangan. Biasanya pencatatan keuangan yang dilakukan beberapa usaha mikro, kecil dan menengah hanya dengan cara sederhana dan kurang lengkap (Krisdiartiwi, 2011).

Dengan adanya kendala di atas, maka Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada tanggal 17 Juli 2009 dan berlaku efektif 1 Januari 2011. Diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik bertujuan untuk mengimplementasikan penyusunan laporan keuangan pada

entitas tanpa akuntabilitas publik. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik karena usaha mikro, kecil dan menengah pada umumnya belum memiliki akuntabilitas publik signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (SAK ETAP, 2009).

Kehadiran Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik diharapkan mampu memberikan kemudahan untuk usaha mikro, kecil dan menengah dalam menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik juga diharapkan mampu menjadi solusi permasalahan internal organisasi bisnis, terutama bagi manajemen yang hanya melihat hasil laba yang diperoleh tanpa melihat kondisi keuangan yang sebenarnya.

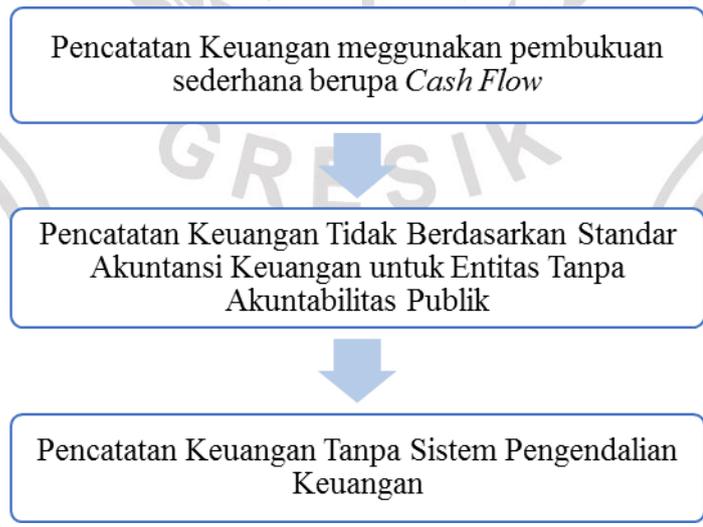
Dalam menjalankan usahanya, ketiga usaha jasa *photocopy* tersebut dalam melakukan pencatatan keuangan masih menggunakan pembukuan sederhana dengan menggunakan cara biasa atau *cash flow* seperti berapa pendapatan yang diperoleh pada hari itu dan pengeluarannya apa saja. Menurut PSAK No. 2 (2015), arus kas (*cash flow*) adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode. Laporan arus kas merupakan revisi darimana uang kas diperoleh organisasi bisnis dan bagaimana mereka membelanjakannya. Laporan arus kas juga merupakan ringkasan dari penerimaan kas dan pengeluaran kas suatu organisasi bisnis selama periode tertentu.

Format laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pada usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru, format laporan keuangan yang digunakan tidak mengikuti Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, sehingga kurang efektif dalam melakukan pengendalian keuangan yang ada di dalam usaha jasa tersebut.

Menurut pemilik usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru, berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha jasa *photocopy* Ireng Poteh yaitu Bapak Antoni mengatakan bahwa pihaknya ingin melakukan pencatatan keuangan berdasarkan standar akuntansi, namun pemilik usaha belum memiliki ilmu akuntansi dan merasa kesulitan dalam melakukan pencatatan keuangan berdasarkan standar akuntansi.

Hal serupa juga diungkapkan oleh pemilik usaha jasa *photocopy* RJM Fotocopy Gresik yaitu Bapak Rudianto dan pemilik usaha jasa *photocopy* Gresik Setting yaitu Ibu Yulia Nurshanti yang mengatakan bahwa untuk melakukan pencatatan keuangan, dengan mengetahui pengeluaran dan pendapatan yang diperoleh saja sudah cukup.



Gambar 1.3
Fenomena

Namun, selama usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru melakukan pencatatan keuangan, meski pemilik usaha dalam melakukan pencatatan keuangan tanpa menggunakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, pendapatan ketiga usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru terus mengalami peningkatan dengan melihat sisa saldo yang tersedia setelah melakukan pencatatan keuangan. Sisa saldo tersebut mengindikasikan adanya kenaikan kekayaan atau adanya laba yang diperoleh ketiga usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru.

Untuk meningkatkan kekayaan yang diperoleh ketiga usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru, diperlukan adanya sistem pengendalian keuangan agar mengetahui apa saja yang selama ini dilakukan oleh pemilik usaha dalam mengelola keuangannya. Menurut Suadi (2011), sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Menurut Harsanti (2010), fokus utama dalam pengendalian keuangan adalah suatu inisiatif yang dipilih dan yang akan mengubah kemungkinan serta pencapaian hasil yang diharapkan.

Sistem pengendalian manajemen jika dikaitkan dengan fungsi akuntansi yaitu dapat menerapkan secara praktis prinsip-prinsip dan praktik akuntansi yang sehat dalam organisasi bisnisnya serta dapat mengembangkan dan memelihara catatan-catatan termasuk pengendalian internal yang memadai sehingga laporan

mencerminkan secara wajar kondisi keuangan dan hasil usaha dari organisasi bisnis (Hery, 2013).

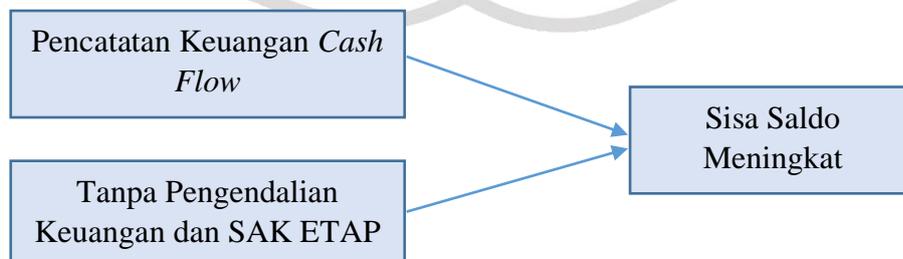
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cahyani (2014) menyatakan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal kas, KSU BMT Sejahtera bisa menaikkan pendapatan dan biaya besar sebesar 14%, kenaikan SHU sebesar 15% peningkatan modal sendiri dengan peningkatan anggota, mengalokasikan investasi untuk pembukuan kantor cabang dan meningkatkan kesejahteraan pengurus, pengawas dan pengelolaan serta anggota. Apabila dikaitkan dengan usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru jika usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru dapat menerapkan sistem pengendalian internal terutama pengendalian keuangan, maka semakin teratur pengelolaan kekayaan yang dimiliki oleh usaha jasa *photocopy* area Gresik Kota Baru, dan pemilik usaha jasa dapat menerapkan pencatatan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Namun hal ini belum diketahui apa saja yang dilakukan pemilik usaha dalam melakukan pengendalian keuangan apabila peneliti belum melakukan penelitian langsung kepada pemilik usaha jasa *photocopy*. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian apakah usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru menggunakan pengendalian keuangan dan apa makna pengendalian keuangan menurut pemilik usaha jasa *photocopy* sehingga sisa saldo dapat meningkat dan kekayaan pemilik usaha jasa juga meningkat.

1.2 Fokus Penelitian

Usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru dalam melakukan pencatatan keuangannya masih menggunakan pembukuan sederhana dengan cara manual atau *cash flow*, di mana usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru dalam melakukan pencatatan keuangan hanya mencatat berapa pendapatan yang diperoleh dan berapa pengeluaran yang dikeluarkan serta pengeluarannya digunakan untuk keperluan apa saja yang dilakukannya. Dalam hal ini, usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru dalam melakukan pembukuan sederhana tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Format standar akuntansi yang digunakan oleh organisasi bisnis terutama usaha kecil dan menengah pada umumnya yaitu Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Format ini terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun, usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru tidak menggunakan format laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, sehingga kurang efektif apabila pemilik usaha melakukan pengendalian keuangannya. Selain itu, dalam menganalisis dan mengetahui kondisi keuangannya, pemilik usaha tidak akan mengetahui berapa laba rugi yang diperolehnya selama ini.



Gambar 1.4
Research Gap

Untuk mengetahui laba atau kekayaan yang diperoleh dan bertahannya usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru dapat diteliti dengan melihat bagaimana pemilik usaha jasa dalam memaknai pengendalian keuangan. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal kas, KSU BMT Sejahtera bisa menaikkan pendapatan dan biaya.

Namun realitanya, tanpa menggunakan pengendalian keuangan, pendapatan usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru terus meningkat dengan mengetahui sisa saldo yang tersedia setelah penghitungan pendapatan dan pengeluarannya. Kekayaan usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru dapat diketahui hanya dengan melalui *cash flow* dan selalu terkendali tanpa menggunakan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana makna pengendalian keuangan tanpa menggunakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka dapat diperoleh tujuan penelitian adalah untuk menelaah makna pengendalian keuangan tanpa menggunakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada usaha jasa *photocopy* di Gresik Kota Baru.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dari penelitian sebagai berikut.

1. Bidang Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan konsep sistem pengendalian manajemen terutama sistem pengendalian keuangan dalam usaha mikro, kecil dan menengah.

2. Bagi Pemilik Usaha Jasa *Photocopy* di Gresik Kota Baru

Sebagai bahan masukan pemilik usaha dalam pengambilan kebijakan guna meningkatkan kinerja dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan menggunakan sistem pengendalian manajemen terutama pengendalian keuangan.

